

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terhitung sejak akhir 2019, infeksi SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*) yang berasal dari keluarga penyebab SARS dan MERS melanda dunia. Infeksi ini pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Meskipun SARS-CoV-2 termasuk dalam keluarga yang sama, penyakit ini lebih menular dibandingkan SARS-CoV dan MERS-CoV (Tan et al., 2020). Karena proses infeksi yang cepat dengan tingkat keparahan yang sangat mengkhawatirkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 30 Januari 2020 mengklasifikasikan penyakit virus corona sebagai KKMMMD/PHEIC (*Public Health Emergency of Global Concern/International Public Health Emergency*). Infeksi virus corona dianggap sebagai darurat kesehatan masyarakat yang serius oleh Organisasi Kesehatan Dunia (Sun et al., 2020).

Pada awal tahun 2020, virus tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terpapar. Karena penyebaran COVID-19 tidak hanya berdampak pada jumlah kematian tetapi juga kerusakan harta benda, jangkauan wilayah yang terdampak semakin luas, juga berdampak pada berbagai aspek sosial-ekonomi, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Pemerintah Indonesia No. 12 tahun 2020, tentang penyebaran virus corona (COVID-19) menyebabkan bencana non alam sehingga digolongkan sebagai bencana nasional (jdih.kemkes.go.id, 2021: 05).

WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) memberikan sejumlah rekomendasi sebagai upaya preventif penyebaran virus COVID-19. Beberapa upaya tindakan tersebut antara lain; menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak, memakai masker

dan meningkatkan ketahanan tubuh (Febriyanti, Choliq, & Mukti, 2021). Di samping itu, Indonesia menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau disebut PPKM dengan tujuan membatasi kegiatan masyarakat yang memicu kerumunan, serta membendung laju kenaikan angka positif COVID-19 (Idris, 2021). Adapun upaya lain yang dilakukan oleh berbagai negara termasuk Indonesia yaitu dengan mengupayakan terbentuknya vaksin COVID-19 (Gandryani & Hadi, 2021).

Program vaksinasi virus corona di Indonesia dimulai pada 13 Januari 2021. Vaksinasi tersebut akan dilakukan setelah keluarnya izin penggunaan darurat (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) (DitJen P2P Kementerian Kesehatan RI, 2021). Selanjutnya, serangkaian tahapan vaksinasi juga dilakukan pada tenaga penunjang kesehatan dan tenaga medis di 34 provinsi di Indonesia. Program vaksinasi bertujuan untuk mencapai kekebalan komunitas atau yang disebut *herd immunity*.

Kekebalan komunitas (*herd immunity*) adalah perlindungan relatif terhadap suatu kumpulan masyarakat yang dicapai dengan mengurangi atau memutus rantai penularan suatu agen infeksi, karena sebagian besar masyarakat aman terhadap penyakit melalui imunisasi atau penyakit alami yang telah diderita sebelumnya (Nasution, 2020). Persiapan vaksinasi di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/38/2021 tentang Penyelenggaraan Vaksinasi COVID-19 bagi Lansia, Penyakit Penyerta, dan Penyintas COVID-19 serta Sasaran Tunda yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Risksdas, 2021).

Lembaga Survei Indonesia melakukan survei nasional secara daring pada 20-25 Juni 2021 untuk mengetahui informasi mengenai sikap masyarakat terhadap vaksin dan program vaksinasi pemerintah. Hasil survei menunjukkan bahwa, 66,5% responden mengatakan mereka hanya tahu sedikit tentang infeksi virus corona (jumlah ini meningkat dalam enam bulan terakhir). Di samping itu, 84,9%, merasa sangat setuju dengan program vaksinasi virus corona. Berdasarkan survei tersebut, beberapa individu kurang bersedia melakukan vaksinasi dengan alasan yang paling dominan adalah karena mereka khawatir akan efek sampingnya (55,5%), menganggap vaksin tersebut tidak memadai (25,4%), dan merasa tidak memerlukan vaksin karena mereka merasa sehat (19%) (LSI, 2021).

Selanjutnya, 69.3% responden cukup yakin dengan keamanan vaksin dan 26,5% responden tidak yakin. Kepercayaan terendah berasal dari suku Minang, Sunda, Bugis, yang berpendidikan terakhir SD, pekerja kerah biru, kemudian responden dari Jawa Barat, Banten, Ibu Kota Jakarta, Kalimantan, dan Sulawesi. Selanjutnya, 69%, responden cukup percaya dengan kehalalan vaksin yang digunakan. Mayoritas masyarakat sudah mengetahui adanya program vaksinasi oleh pemerintah dan menyetujuinya. Bagaimanapun, jumlah individu yang menerima bahwa vaksin dapat mencegah seseorang tertular virus corona lebih sedikit. Artinya, sejumlah masyarakat masih tidak percaya dengan efikasi vaksin (LSI, 2021).

Vaksinasi COVID-19 memiliki tingkat keberhasilan yang rendah di Indonesia. Per 5 September 2021, jumlah orang yang telah menerima vaksin virus corona dosis kedua adalah 38,2 juta orang (14,1%) dengan target vaksinasi yaitu

208,3 juta orang (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021). Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman (Sehatnegeriku.kemkes.go.id, 2021). Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan angka persentase terendah dalam implementasi vaksinasi COVID-19 dari tiga daerah lainnya di Indonesia. Kementerian Kesehatan memberikan sejumlah informasi per tanggal 10 Oktober 2021, bahwa vaksinasi telah dilakukan pada 4.408.509 orang di Sumbar, dengan rincian sebanyak 1.114.877 orang atau (25,29%) untuk pemberian vaksin dosis pertama dan sebanyak 568.327 orang atau (12,89 %) untuk pemberian vaksin dosis lengkap. Sementara itu, Kota Padang tercatat sebagai salah satu penyumbang kasus positif COVID-19 sebanyak 42.922 kasus di Sumbar (Diskominfo Kota Padang, 2021).

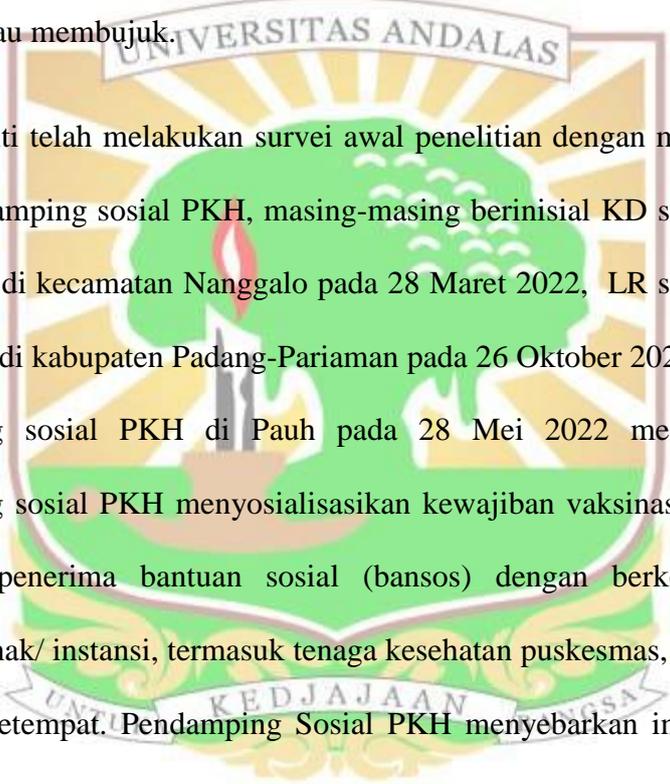
Berdasarkan perhitungan, capaian vaksinasi akan meningkat sebanyak 18.000 jiwa, jika seluruh penerima bansos bersedia melakukan vaksinasi. Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkot Padang memfokuskan pada beberapa kelompok masyarakat termasuk penerima bantuan sosial, baik itu PKH, BTS, maupun KIS (Emen HLN, 2021). Penetapan penerima bantuan sosial sebagai sasaran vaksinasi ditengarai oleh temuan data BPS, yang memaparkan bahwa angka kemiskinan pada bulan Maret 2020 mencapai 9,78% atau 26,42 juta jiwa. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 9,41% atau 25,14 juta jiwa (BPS, 2020). Angka kemiskinan ini juga terus meningkat seiring peningkatan penyebaran COVID-19. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menargetkan PKH sebagai jaring pengaman sosial dengan memperluas cakupan, penerima dan peningkatan indeks manfaat. Secara sederhana, PKH (Program Keluarga Harapan) dapat dikatakan sebagai salah satu program perlindungan sosial dalam bentuk

bantuan sosial di Indonesia. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan dengan persyaratan khusus yang terdaftar dalam Data Bantuan Sosial Terpadu (DTKS) (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2021).

Kementerian Kesehatan mengambil langkah signifikan untuk menurunkan angka kematian dan dampak COVID-19 dengan dukungan dari Dinas Sosial, dikarenakan belum terealisasinya vaksinasi di kalangan masyarakat Sumatera Barat secara optimal. Salah satu bentuk upaya tersebut dengan mengeluarkan surat edaran terkait himbauan melakukan vaksinasi COVID-19 secara mandiri yang diteruskan kepada seluruh pendamping sosial PKH. Untuk dapat mempengaruhi sikap keluarga penerima manfaat PKH terhadap program vaksinasi COVID-19, diuraikan peran dan fungsi pendamping sosial antara lain pembinaan/fasilitator, mediasi, advokasi, edukasi, dan motivasi bagi KPM PKH.

Pemanfaatan proses pendampingan difokuskan pada pendampingan kelompok sekaligus memberikan dukungan kepada KPM PKH yang memiliki kendala. Pendamping sosial akan melakukan pendampingan secara grup atau komunal pada keluarga penerima manfaat PKH terlaksana dalam sesi Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Pada masa pandemi, pendampingan bagi KPM PKH diperlukan untuk mendukung tercapainya salah satu tujuan dibentuknya PKH, yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM PKH terkait pemanfaatan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini KPM PKH dapat memanfaatkan fasilitas untuk memperoleh vaksinasi di puskesmas sekitar tempat tinggal.

Adapun upaya dominan yang telah dilakukan pendamping sosial PKH yaitu memberikan edukasi dasar tentang COVID-19 serta memberikan informasi terkini terkait pelaksanaan dan pengadaan vaksinasi COVID-19 kepada KPM melalui pendekatan-pendekatan dalam pertemuan kelompok (PK) atau Pertemuan Peningkatan Keterampilan Keluarga (P2K2) serta turut mengajak untuk bersama-sama melakukan vaksinasi. Kegiatan mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok individu lain merupakan kegiatan yang bersifat persuasif atau membujuk.



Peneliti telah melakukan survei awal penelitian dengan mewawancarai tiga orang pendamping sosial PKH, masing-masing berinisial KD selaku pendamping sosial PKH di kecamatan Nanggalo pada 28 Maret 2022, LR selaku pendamping sosial PKH di kabupaten Padang-Pariaman pada 26 Oktober 2021, dan WD selaku pendamping sosial PKH di Pauh pada 28 Mei 2022 menyebutkan bahwa pendamping sosial PKH menyosialisasikan kewajiban vaksinasi COVID-19 bagi kelompok penerima bantuan sosial (bansos) dengan berkoordinasi melalui berbagai pihak/ instansi, termasuk tenaga kesehatan puskesmas, kecamatan atau di kelurahan setempat. Pendamping Sosial PKH menyebarkan informasi vaksinasi sekaligus mengajak keluarga penerima manfaat (KPM PKH) mengikuti vaksinasi melalui komunikasi tatap muka maupun melalui media, seperti *WhatsApp group*.

Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Wali Kota mengamanatkan agar semua penerima bantuan sosial, termasuk yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial PKH, wajib divaksinasi. Sebelum surat edaran sampai ke kecamatan, rekan-rekan pendamping sudah menginformasikan kepada KPM

tentang dimulainya vaksinasi oleh pemerintah. Pendamping "WD" menyebutkan bahwa sudah mulai memberikan edukasi vaksin kepada KPM PKH dan mendapat informasi bahwa vaksinasi harus segera diberikan. Dimulai dengan edukasi umum berlanjut ke instruksi KPM yang lebih rinci. Edukasi ini dilakukan setiap bulan. Sebab, PKH mengadakan pertemuan kelompok dan P2K2 sebulan sekali. KPM wajib menghadiri pertemuan kelompok ini bersama rekan-rekan PKH-nya. Pada pertemuan kelompok, pengetahuan tentang vaksinasi dijelaskan dan beberapa upaya dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam mendapatkan vaksinasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan menggunakan metode khusus yang diterapkan oleh pendamping. Bagaimana caranya, setiap pendamping sudah mengetahui strateginya, sehingga KPM bisa bertanya seputar vaksin dan tata cara vaksinasi. Pendamping WD menyebutkan bahwa KPM dibawah dampungannya bersedia mengikuti vaksinasi (WD, perempuan, 28 Mei 2022).

Berdasarkan fakta dan data yang ada, Wali Kota Padang mengeluarkan surat edaran No.6422/DKK-PDG/IX/2021 tanggal 21 September 2021 dalam rangka penanganan *corona virus disease* 2019 (COVID-19). Dalam edaran tersebut, pendamping sosial PKH diminta untuk mengarahkan seluruh KPM PKH untuk melakukan vaksinasi di puskesmas terdekat (Dinas Sosial, 2021). Tercatat 3.396 KPM PKH atau penerima bansos di Kota Padang telah menerima vaksin dosis pertama dan 1.388 KPM sudah menerima vaksin dosis kedua. KPM yang belum dapat melakukan vaksinasi karena beberapa hal sebanyak 6.264 dan sisanya 13.770 belum menerima vaksinasi. Kota Padang menjadi kota dengan penerima PKH terbanyak berjumlah 20.034 KK dari total 209.911 KK yang ada di Sumatera Barat (UPPKH Kota Padang, 2022).

Dalam proses mengajak KPM PKH dalam mensukseskan program vaksinasi pemerintah agar *herd immunity* segera terwujud, diperlukan cara yang efektif dalam berkomunikasi terkait pelaksanaan vaksinasi. Salah satu langkah yang dilakukan pendamping sosial PKH untuk menghimbau anggotanya dengan komunikasi persuasif. Pendamping sosial sebagai pelaksana utama pembinaan keluarga penerima manfaat (KPM) berperan sebagai individu yang memiliki karakter positif serta memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan yang bersifat imbauan atau ajakan pada KPM PKH. Effendy (1996: 20-21) mengungkapkan mengenai peran komunikator adalah menjadi pihak yang bertindak efektif untuk melakukan persuasi atau memberikan pengaruh kepada audiens. Hal ini ditegaskan oleh (Rakhmat, 2011: 09), bahwa komunikasi merupakan suatu peristiwa sosial yang dihasilkan dari suatu proses interaksi antara seorang individu dengan individu lainnya. Salah satu ciri utama individu sebagai makhluk sosial adalah cenderung mempengaruhi individu lain melalui ucapan atau kata-kata dan bahkan menggunakan simbol. Komunikasi persuasif merupakan suatu cara berkomunikasi yang mempunyai tujuan yang jelas dan terarah, dimana tujuannya adalah untuk mengubah sikap seseorang yang menjadi sasaran komunikasi atau yang lebih sering disebut dengan komunikan.

Penelitian yang mendukung kesimpulan bahwa komunikasi persuasif mempengaruhi sikap ditunjukkan oleh (Yusuf & Prianggono, 2021), dimana komunikasi persuasif mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap sikap patuh pedagang kios dengan memberikan pengaruh sebesar 67,1% dan sisanya sebesar 32,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini menunjukkan bahwa para pedagang di kios Candi Borobudur yang mengikuti protokol kesehatan COVID-

19 memiliki sikap yang lebih positif, tergantung seberapa persuasif komunikasi yang dilakukan. Penelitian terkait komunikasi persuasif memberikan dampak positif pada sikap juga ditunjukkan dalam penelitian oleh (Niftah & Rahmat, 2017) terkait pengaruh kredibilitas konselor terhadap sikap remaja mengenai HIV/AIDS di Sukabumi. Keahlian, keterpercayaan, dan daya tarik semuanya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sikap remaja terhadap HIV/AIDS. Keterampilan komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan tentang bahaya HIV/AIDS penting bagi remaja. Kepercayaan terhadap konselor HIV/AIDS meningkatkan kesediaan mereka untuk menghindari perilaku berisiko seperti penggunaan narkoba dan seks bebas, serta kesediaan mereka untuk memberitahukan risikonya kepada orang lain dan mampu menambah pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS. Selanjutnya penelitian oleh (Aw, 2015) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara karakteristik kepala desa sebagai komunikator dalam proses komunikasi persuasif dengan sikap PKL terhadap ketertiban lingkungan, dengan koefisien korelasi sebesar $0,442 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik kepala desa sebagai komunikator cukup mampu mendorong perubahan sikap para pedagang kaki lima dalam mendukung program pemerintah dalam tata kelola lingkungan.

Sikap adalah kecenderungan atau kemauan untuk bertindak, mempersepsi, berpikir, atau merasakan ketika berhadapan dengan objek, pikiran, situasi, atau nilai. Sikap bukanlah suatu tingkah laku, melainkan suatu kecenderungan untuk berperilaku tertentu terhadap objek sikap itu. Ketika seseorang merespons sesuatu, dapat berupa benda, orang atau tempat (atau apa pun), gagasan, situasi, maupun kelompok (Rakhmat, 2018: 49). Sikap juga dapat dipandang sebagai suatu

perwujudan adanya kesadaran terhadap lingkungan. Mengingat KPM PKH merupakan salah satu kelompok paling rentan terhadap COVID-19, maka pembentukan sikap pada keluarga penerima manfaat PKH menjadi sangat penting, khususnya ibu hamil, pelajar, lansia dan penyandang disabilitas dalam beraktivitas di luar rumah.

Pentingnya pembentukan sikap kesediaan KPM PKH mengikuti vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk melindungi diri dan orang-orang disekitar dari bahaya yang ditimbulkan apabila terjangkit COVID-19. Meskipun tindakan sehari-hari dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan dan keyakinan pribadi, sikap manusia merupakan prediktor yang paling signifikan. Hal ini menyiratkan bahwa sikap sebagian individu menentukan tindakannya, namun dalam kasus lain, sikap tidak mempengaruhi tindakan. Sebuah penelitian yang dilakukan (Rosidin, Rahayuwati, & Herawati, 2020) menemukan bahwa pengetahuan dan sikap yang baik mengenai penyakit infeksi corona (COVID-19) dapat mendorong tindakan pencegahan. Bertolak dari hasil penelitian tersebut, selanjutnya penting diulas lebih lanjut untuk menjelaskan sikap kesediaan mengikuti vaksinasi COVID-19 khususnya bagi KPM PKH.

Pengalaman pribadi, budaya, dan orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan atau lembaga keagamaan dan aspek emosional seseorang sebagai faktor dalam pembentukan sikap (Zuchdi, 1995). Hal ini mungkin juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wilianarti & Wulandari, 2021) yaitu optimalisasi peran kader dengan menggunakan *peer group education* dalam meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19. Hasil penelitian

menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan masyarakat, terutama kelompok resiko tinggi lanjut usia mengenai pentingnya vaksinasi. Metode *peer group* efektif dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan mengenai vaksinasi COVID-19, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektoral untuk memperluas cakupan vaksinasi, guna meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Berangkat dari seluruh permasalahan yang ada terkait vaksinasi COVID-19, peneliti tertarik menganalisis lebih lanjut bagaimana himbauan yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH dapat merubah sikap dan pandangan KPM PKH mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19 untuk melindungi KPM PKH dari resiko penyebaran COVID-19. Komunikasi persuasif digunakan dalam penelitian ini karena sebelumnya sudah ada penelitian sejenis yang memiliki kesimpulan positif mengenai dampak komunikasi persuasif. Akan tetapi, belum terdapat penelitian secara eksplisit membahas pengaruh komunikasi persuasif pendamping sosial terhadap sikap kesediaan mengikuti vaksinasi COVID-19 pada KPM PKH Kota Padang. Komunikasi ini dinilai lebih efektif di kalangan masyarakat, terutama bagi KPM PKH dalam membentuk sikap positif yang dikehendaki oleh komunikator untuk melindungi diri dari terpapar COVID-19 serta mengurangi resiko lebih parah jika terinfeksi COVID-19 dengan cara vaksinasi.

Sebagai upaya menunjukkan adanya kebaruan (*novelty*) antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, maka peneliti berusaha untuk merumuskan perspektif yang berbeda, dimana penelitian ini berfokus pada upaya persuasif pendamping sosial dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di Kota Padang pada masa

pandemi. Karena penelitian ini menggunakan metode kuantitatif maka datanya terukur dan sistematis sehingga lebih kuat untuk dijadikan landasan kebijakan untuk permasalahan sejenis, seperti munculnya wabah virus mematikan Chandipura di India yang belum ditemukan vaksin untuk mencegah infeksi tersebut.

Berdasarkan paparan tersebut, Peneliti mengangkat penelitian yang berjudul “Pengaruh Komunikasi Persuasif Pendamping Sosial Terhadap Sikap Kesiapan Mengikuti Vaksinasi COVID-19 Pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kota Padang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kredibilitas pendamping sosial sebagai komunikator dalam proses komunikasi persuasif terhadap sikap kesiapan mengikuti vaksinasi COVID-19 pada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) Kota Padang?
2. Seberapa besar kredibilitas pendamping sosial sebagai komunikator dalam proses komunikasi persuasif terhadap sikap kesiapan mengikuti vaksinasi COVID-19 pada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dirancang untuk:

1. Mengetahui pengaruh kredibilitas pendamping sosial sebagai komunikator dalam proses komunikasi persuasif terhadap sikap kesediaan mengikuti vaksinasi COVID-19 pada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) Kota Padang.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh kredibilitas pendamping sosial sebagai komunikator dalam proses komunikasi persuasif terhadap sikap kesediaan mengikuti vaksinasi COVID-19 pada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini khusus mengkaji pengaruh kredibilitas pendamping sosial sebagai komunikator persuasif terhadap sikap kesediaan mengikuti vaksinasi COVID-19 pada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) Kota Padang yang diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan bidang ilmu komunikasi, sehingga dapat dijadikan sumber penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat:

1. Sebagai pertimbangan bagi sumber daya manusia (SDM) PKH khususnya pendamping sosial untuk menerapkan komunikasi persuasif dalam meningkatkan cakupan penerimaan vaksin bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

2. Sebagai bahan rujukan dalam merumuskan faktor penting yang berkontribusi terhadap komunikasi persuasif berupa karakteristik komunikator, pesan, saluran dan penerima. Kunci keberhasilan komunikasi adalah kedua belah pihak memiliki kesamaan pemahaman informasi, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif dan persuasif.
3. Memberikan informasi kepada instansi/ lembaga sosial maupun lembaga yang berwenang tentang pentingnya komunikasi persuasif pendamping sosial terhadap sikap kesediaan mengikuti vaksinasi COVID-19 pada KPM PKH Kota Padang.

